

# Bab 6 Kesimpulan dan Saran

## 6.1. Kesimpulan

Saat ini indeks Nilai Tukar Petani (NTP) dianggap menjadi salah satu proxy/pendekatan untuk mengukur tingkat daya beli petani, meskipun belum bisa menggambarkan tingkat kesejahteraan petani. Hal ini disebabkan INTP hanya melihat perubahan dan memantau perkembangan harga paket komoditi yang sudah ditetapkan pada tahun dasar sedangkan nilai produksinya/Quantity dianggap stabil, padahal kenyataannya produksi pertanian sangat dipengaruhi faktor musim, hama pengganggu dan faktor lainnya.

Dengan struktur tata niaga pertanian yang terjadi saat ini, kenaikan harga produk yang diterima petani tidak identik dengan peningkatan pendapatan petani. Kenaikan harga yang diterima petani justru mengindikasikan kelangkaan supply/ produksi pertanian. Peningkatan INTP berarti kenaikan harga yang diterima petani (harga produsen) dengan proporsi yang lebih tinggi dari harga yang dibayar petani (harga konsumen). Pada kondisi demikian maka INTP yang konstan dinilai lebih baik, karena pada INTP yang konstan berarti perubahan harga yang diterima petani meningkat (atau menurun) secara proporsional dengan perubahan harga yang dibayar petani.

Beberapa kesimpulan dari hasil pendataan dan kajian yang dilakukan terkait perkembangan angka Indeks Nilai Tukar Petani (INTP) sepanjang Tahun 2017:

1. Indek Nilai Tukar Petani (INTP) pada bulan Desember Tahun 2017 sebesar 112,01. Indeks ini menunjukkan bahwa dibandingkan tahun dasar 2012, kemampuan tukar produk pertanian secara umum meningkat 12,01 point, meskipun perkembangan tiap bulan fluktuatif tapi cenderung membaik.
2. Indek Nilai Tukar Usaha Petani (INTUP) pada bulan Desember Tahun 2017 sebesar 116,4. Indeks ini menunjukkan bahwa dibandingkan tahun dasar 2012, kemampuan tukar produk pertanian secara umum meningkat 16,4 point, meskipun perkembangan tiap bulan fluktuatif tapi cenderung membaik
3. Indek Nilai Tukar Petani (INTP) Subsektor Tanaman Pangan pada bulan Desember Tahun 2017 sebesar 107,72. Indeks ini menunjukkan bahwa dibandingkan tahun dasar 2012, kemampuan tukar produk pertanian sub sektor tanaman pangan dalam kurun lima tahun terakhir meningkat 7,72 point.

4. Indek Nilai Tukar Petani (INTP) Subsektor Hortikultura pada bulan Desember Tahun 2017 sebesar 107,19. Indeks ini menunjukkan bahwa dibandingkan tahun dasar 2012, kemampuan tukar produk pertanian sub sektor tanaman pangan dalam kurun lima tahun terakhir meningkat 7,19 point.
5. Indek Nilai Tukar Petani (INTP) Subsektor Peternakan pada bulan Desember Tahun 2017 sebesar 110,75. Indeks ini menunjukkan bahwa dibandingkan tahun dasar 2012, kemampuan tukar produk pertanian sub sektor tanaman pangan dalam kurun lima tahun terakhir meningkat 10,75 point.
6. Indek Nilai Tukar Petani (INTP) Subsektor Perikanan Tangkap pada bulan Desember Tahun 2017 sebesar 116,36. Indeks ini menunjukkan bahwa dibandingkan tahun dasar 2012, kemampuan tukar produk pertanian sub sektor tanaman pangan dalam kurun lima tahun terakhir meningkat 16,36 point.
7. Indek Nilai Tukar Petani (INTP) Subsektor Perikanan Budidaya pada bulan Desember Tahun 2017 sebesar 125,55. Indeks ini menunjukkan bahwa dibandingkan tahun dasar 2012, kemampuan tukar produk pertanian sub sektor tanaman pangan dalam kurun lima tahun terakhir meningkat 25,55 point.
8. Indek Nilai Tukar Petani (INTP) Subsektor Perikanan Perkebunan Rakyat pada bulan Desember Tahun 2017 sebesar 108,62. Indeks ini menunjukkan bahwa dibandingkan tahun dasar 2012, kemampuan tukar produk pertanian sub sektor tanaman pangan dalam kurun lima tahun terakhir meningkat 8,62 point.
9. Dengan melihat INTP enam sub sektor, maka sub sektor budidaya ikan yang memiliki nilai tukar produk tertinggi sedangkan sub sektor terendah adalah sub sektor hortikultura.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan, pemerintah telah melakukan beberapa langkah yang searah dengan penekanan harga yang dibayar petani, baik yang berkaitan dengan penekanan harga konsumsi rumah tangga maupun harga Biaya produksi dan pembentukan modal (BPPBM). Berkaitan dengan pengurangan beban, pemerintah telah melakukan langkah antara lain:

1. Pemberian bantuan beras untuk orang miskin (Raskin) yang secara langsung menekan pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan.
2. Penekanan biaya pendidikan melalui subsidi Program Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Bantuan Operasional Sekolah serta Program KIP (Kartu Indonesia Pintar).
3. Penekanan biaya kesehatan, dalam bentuk BPJS PBI (Penerima bantuan luran) atau Jaminan Kesehatan Masyarakat zaman dulu, Kartu Indonesia Sehat (KIS), jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.

4. Untuk mengurangi biaya produksi, pemerintah memberi subsidi harga sarana produksi (benih dan pupuk) dan subsidi bunga kredit. Kebijakan yang bersifat pro rakyat untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagian besar relevan untuk memperbaiki INTP.

## **6.2. Saran dan Rekomendasi**

- a. Peningkatan produktivitas usaha tani merupakan salah satu peluang peningkatan pendapatan petani. Peningkatan produktivitas dan nilai jualnya perlu didukung dengan peningkatan akses kepada teknologi (melalui bimbingan dan penyuluhan), peningkatan akses terhadap layanan usahatani dan infrastruktur untuk memperoleh kemudahan sarana produksi dan peningkatan akses pasar.
- b. Dengan kondisi dasar skala usaha tani (skala pemilikan) rumahtangga petani skala kecil, maka pola usaha tani petani perlu dilakukan melalui pendekatan pengembangan usaha tani terpadu dengan memaksimalkan pemanfaatan lahan yang terbatas. Melalui pengembangan pola usaha tani terpadu akan mengurangi resiko akibat kegagalan produksi dari suatu tanaman tertentu. Pengembangan pola usaha tani terpadu juga dinilai strategis sebagai langkah antisipasi kondisi anomali iklim yang semakin sulit diprediksi.
- c. Kebijakan dan program pemerintah yang telah dilakukan untuk peningkatan pendapatan petani melalui bantuan subsidi, penyediaan infrastruktur; serta kebijakan untuk pengendalian pengeluaran konsumsi rumahtangga (seperti pemberian raskin, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, dan lainnya) dinilai sangat relevan dalam perbaikan kesejahteraan petani dan layak diteruskan secara berkelanjutan dan terintegrasi hingga tercapai kesejahteraan yang diharapkan bagi petani.